

**KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

Oleh:
Angreini Pangumbalerang¹
Sherly Pinatik²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : ¹pangumbalerangangreini@yahoo.co.id
²Sherlee79@yahoo.co.id

ABSTRAK

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi fenomena global termasuk di Indonesia, sehingga menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk dibidang pengelolaan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung (BPKBMD). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan uji asumsi klasik. Sampel yang digunakan sebanyak 40 responden yang merupakan *lower* manajer dan staf dari seluruh aparat pemerintah yang ada di DIPENDA dan BPKBMD kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada DIPENDA dan BPKBMD Kota Bitung. Diperlukan penyempurnaan dalam sistem informasi akuntansi keuangan sehingga penyajian informasi lebih tepat, cepat dan bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan serta perlu mensosialisasikan tujuan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Kata kunci: *kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas kinerja*

ABSTRACT

Reform of the public sector with the demands of democratization become a global phenomenon, including in Indonesia, causing aspects of transparency and accountability to be important in the management of governance, including in the field of financial management. The purpose of this study was to determine the effect of budget clarity to the performance accountability of government agencies at the Revenue Office and Financial Management Board and District Property Bitung City. The method of data analysis used in this study is a simple regression analysis and classical assumption. The sample used by 40 respondents which is lower managers and staff of the entire population of government officials in both the Department and the Agency. The results of this study are budget goal clarity no significant effect on the performance accountability of government agencies and the Revenue Office of Financial Management Board and District Property Bitung City. Needed improvements in financial accounting information system so that the presentation of information is more precise, fast and useful to users of financial information and the need to disseminate the intended use of the budget as well as possible so that no irregularities in the use of the budget.

Keywords: *budget goal clarity, performance accountability*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global, termasuk di Indonesia, sehingga menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk dibidang pengelolaan keuangan Negara. Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonom yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan suatu daerah.

Desentralisasi pengelolaan pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas juga memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penganggaran merupakan suatu proses politik dalam organisasi sektor publik. dalam hal ini anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo 2000:61). Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Jadi, anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Karakteristik anggaran salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam strategi daerah (Renstrada) dan program pembangunan daerah (Propeda). Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target anggaran yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Dengan demikian kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Kieso,dkk. (2008:2) mengatakan akuntansi adalah semua proses yang meliputi identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisiran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Taswan (2013:15) mengatakan akuntansi didefinisikan sebagai konsep informasi maupun sistem informasi. Konsep informasi dalam bentuk penyediaan data-data kuantitatif atau bersifat keuangan dalam pengambilan keputusan, dan sistem informasi yaitu dalam proses menjalin komunikasi dan informasi.

Konsep Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2006:5) Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu, penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah maupun publik. Mardiasmo (2005:2) Akuntansi Sektor Publik dapat dipahami sebagai suatu entitas

yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam angka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi Sektor Publik diidentifikasi sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Akuntansi Manajemen

Simamora (2012:1) mengatakan akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, penghimpunan, penganalisaan, penyusunan, penafsiran, dan pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan usaha didalam sebuah organisasi, serta untuk memastikan penggunaan dan akuntabilitas sumber daya yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen adalah informasi yang disediakan perusahaan untuk kepentingan pihak internal dalam membuat keputusan. Mulyadi (1997:3) mengatakan bahwa akuntansi manajemen ditujukan untuk menyediakan informasi keuangan bagi keperluan manajemen.

Anggaran

Bustani dan Nurlela (2006:1) berpendapat bahwa anggaran adalah pernyataan dalam kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit moneter, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Manus (2009) anggaran dapat dijadikan sebagai manifestasi dari rencana yang akan dicapai dimasa yang akan datang dan pada masa yang sama *budget* itu menjadi alat kontrol.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Bastian (2006:24) Kejelasan dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap komitmen pencapaian sasaran dan timbulnya kepuasan terhadap karyawan. Manus (2009) kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Akuntabilitas

Ulum (2004:31) Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya. Adapun menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan "Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik." Dari pengertian diatas dapat diambil intinya bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Kinerja

Ikatan Akuntan Indonesia (2002:4) Kinerja dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Mashun (2006:15) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Dapat disimpulkan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah membantu memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi.

Akuntansi Keuangan Daerah

Halim (2002:34) Definisi Akuntansi Keuangan Daerah didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, asset, dan prosedur akuntansi selain kas". Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah adalah memberikan info kepada para pengambil keputusan dalam suatu entitas atau organisasi pemerintah daerah atau kota.

Penelitian Terdahulu

Manus (2009) dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah pada Instansi Kota Manado. Menggunakan 30 sampel aparat pemerintah lower atas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan dan searah positif dengan kinerja aparat pemerintah pada Instansi Kota Manado. Kosegaran (2009), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran pada Instansi Pemerintah Kota Manado. Menggunakan 30 sampel aparat pemerintah lower atas dan staff. Hasil penelitiannya kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran.

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adalah:

- Ho : Kejelasan sasaran anggaran diduga tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan dan BPKBMD Kota Bitung.
- H1 : Kejelasan Sasaran diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan BPKBMD Kota Bitung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanasi yang asosiatif yang bertujuan menjelaskan pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan pembagian kuisioner pada kedua Dinas dan Badan. Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan secara tidak acak yang infonya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan kriteria. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, dan 40 orang dipilih sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dengan melakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu, yaitu uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kota Bitung terletak pada posisi diantara 1023'23'-1035'39'LU DAN 12501'43-125018'13'BT. Nama Bitung berasal dari nama sebuah pohon yang tumbuh rindang disepanjang pesisir pantai Kota Bitung. Keberhasilan pembangunan kota Bitung yang dicerminkan dari laju pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan dan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para imigran untuk tinggal dan bekerja di Kota Bitung. Menyadari heterogenitas penduduk dengan berbagai latar belakang budaya, maka pembangunan Kota Bitung diarahkan pada terwujudnya Kota Bitung sebagai kota pelabuhan internasional, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan unggul di era globalisasi sesuai dengan visi yang akan dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Kota Bitung. Tantangan, potensi dan dinamika lingkungan yang mempengaruhi perkembangan pembangunan Kota Bitung merupakan motivasi bagi pemerintah dan masyarakat serta semua *stakeholder* pembangunan untuk merancang dan melaksanakan pembangunan dengan mengarahkan pada skala prioritas yang dapat menggerakkan roda perekonomian rakyat dan menjamin kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Tugas pokok dari DIPENDA Kota Bitung yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Bitung dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan fungsi dari DIPENDA yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknik pendapatan daerah
2. Pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam pendapatan daerah, dan
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang dipimpin oleh kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada walikota, mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota dibidang keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, BPKBD mempunyai fungsi:

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di BPKBD Kota Bitung

2. Menyusun rancangan APBD, perubahan APBD, bersama panitia dibawah panitia penyusun anggaran di bawah koordinasi sekretaris Kota
3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggarandi BPKBD Pemerintah Kota Bitung
4. Memberikan saran dan hasil pertimbangan kepada walikota tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Untuk menguji kebenaran hipotesis pada penelitian ini digunakan uji validitas dan reliabilitas dalam hal pengujian data yang diperoleh dengan menguji tiap kuisioner yang ada dengan nilai korelasi minimal 0,30. Untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan maka digunakan analisis *reality* melalui metode *cronbach alpha*, dimana suatu instrumen dikatakan *reliable* bila memiliki koefisien keandalan atau *alpha* sebesar 0,6 atau lebih.

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Cronbach Alpha
Kejelasan sasaran Anggaran (X)	0,626	0,577	0,734	0,784						0,803
Kinerja (Y)	0,318	0,725	0,415	0,777	0,626	0,355	0,650	0,665	0,430	0,753

Sumber: Olahan Data SPSS

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk pertanyaan 1-9 untuk variabel x dan y, mempunyai nilai korelasi di atas 0,30 dan *cronbach alpha* 0,753. Semua dinyatakan *reliable* dan valid.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Descriptif Statistic

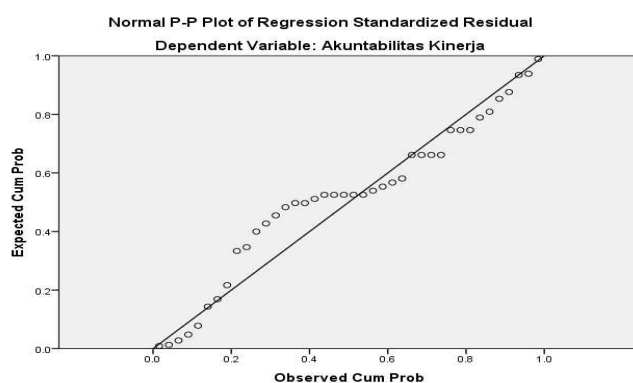
Mean	Std. Deviation	N
Akuntabilitas Kinerja	36,00	40
Kejelasan Sasaran Anggaran	16,90	40

Sumber: Olahan Data SPSS

Akuntabilitas kinerja memiliki nilai mean 36,00 dan standar deviasi 4,026. Kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai mean 16,90 dan standar deviasi 1,614.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal dengan menggunakan gambar Normal P-P Plot. Plot grafik menjelaskan asumsi normalitas terpenuhi jika titik-titik pada grafik mendekati atau berada disekitar sumbu diagonalnya.

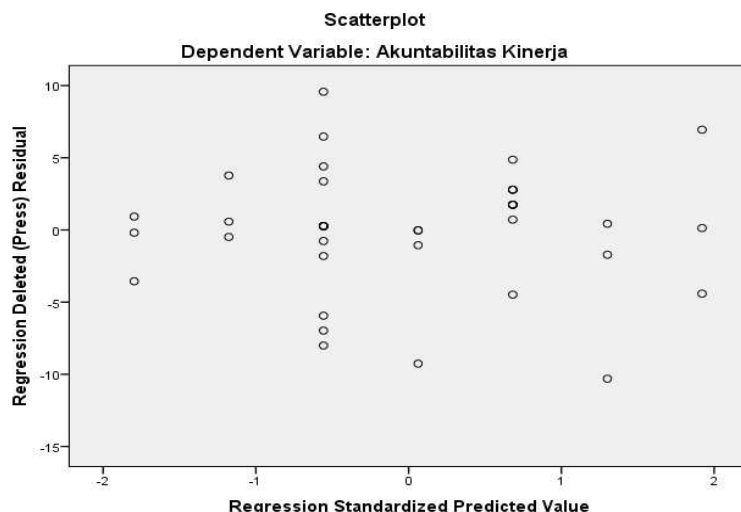


Gambar 1. Uji Normalitas
Sumber: Olahan Data SPSS

Analisis kurva Gambar.1 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat dilihat bahwa data yang diolah merupakan data yang terdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pola titik-titik pada *Scatterplots* regresi, dimana jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Olahan Data SPSS

Gambar. 2 menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Multikolenieritas

Uji multikolenieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel bebas dan variabel terikat. Pendeteksian dilakukan dengan melihat nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 10$ yang berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kejelasan Sasaran Anggaran	1,000	1,000

Sumber : Olahan data SPSS

Hasil dari output data menghasilkan nilai VIF untuk variabel kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar $1,000 < 10$ dan nilai $tolerance$ $0,918 > 0,10$ $1,058 < 10$ dan nilai $tolerance$ $0,945 > 10$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini.

Koefisien Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 4. Koefisien Korelasi

		Akuntabilitas Kinerja	Kejelasan Sasaran Anggaran
<i>Pearson Correlation</i>	Akuntabilitas Kinerja	1,000	0,114
	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,114	1,000
<i>Sig. (1-tailed)</i>	Akuntabilitas Kinerja		0,241
	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,241	
N	Akuntabilitas Kinerja	40	40
	Kejelasan Sasaran Anggaran	40	40

Sumber: Olahan data SPSS

Hasil olahan data menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (x) mempunyai korelasi yang bersifat lemah, positif dan tidak signifikan dengan akuntabilitas kinerja (y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar $0,114 < 0,500$. Hal ini berarti apabila kejelasan sasaran anggaran (x) naik, maka akuntabilitas kinerja (y) akan naik pula, demikian sebaliknya.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.114	,013	-0.013	4.051

Sumber: Olahan data SPSS

Hasil output SPSS *model summary*, dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi terlihat dari nilai *R square* yaitu sebesar 0,013 atau 1,3%, sedangkan 98,7 dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini.

Analisis Regresi Sederhana**Tabel 6. Koefisien Regresi**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	31,176	6,823
	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,285	0,402

Sumber: Olahan data SPSS

Koefisien untuk persamaan regresi dari data yang diteliti adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X$$

$$Y = 31,176 + 0,285X$$

Nilai konstan sebesar 31,176 menunjukkan bahwa jika variabel kejelasan sasaran anggaran dianggap konstan atau sama dengan nol (0) maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bitung adalah sebesar 31,176 satuan *score*. Koefisien regresi sebesar 0,285 mengartikan bahwa jika faktor kejelasan sasaran anggaran meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada DIPENDA dan BPKBMD akan meningkat sebesar 0,285 satuan *score* dari kondisi sebelumnya.

Uji t (parsial)

Uji parsial (t) ini dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Uji t

<i>Model</i>	<i>Standardized Coefficients</i>			<i>95% Confidence Interval For B</i>
	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Lower Bound</i>
1 (Constant)		4,569	0,000	17,364
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.114	0.71	0.482	-0.528

Sumber: Olahan data SPSS

Tabel.7 menunjukkan hasil uji t untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (x). Nilai t hitung variabel x adalah 0,710. Dengan tingkat kepercayaan 5% pada derajat kebebasan (n-2) $40-2 = 38$, dapat diketahui t tabel sebesar 2,021. Dengan demikian t hitung < t tabel, dengan nilai signifikan $0,482 > 0,05$. Hal ini berarti variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Pembahasan

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, maka semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi akan naik pula, akan tetapi kejelasan anggaran hanya memiliki pengaruh yang kecil saja, sedangkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kejelasan Sasaran anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manus (2009) yang berjudul pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Manado, dan Kosegaran (2009) pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran pada instansi pemerintah Kota Manado, diperoleh hasil kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Manado.

PENUTUP**Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, artinya kejelasan sasaran anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada DIPENDA dan BPKBMD Kota Bitung meskipun belum dianggap penting dalam pelaksanaannya.

Saran

Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung sebaiknya menerapkan kejelasan sasaran anggaran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehingga diharapkan akuntabilitas kinerja dapat meningkat, serta sebaiknya mensosialisasikan tujuan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran serta sebaiknya melakukan penyempurnaan dalam sistem informasi akuntansi keuangan sehingga penyajian informasi lebih tepat, cepat dan bermanfaat secara optimal bagi pengguna informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. Edisi ke-2, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Bustami Bastian dan Nurlela, 2006. *Akuntansi Biaya*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Halim. Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ihya'ul Ulum, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UMM, Malang.
- Kosegaran, Anando, 2009. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran pada Instansi Pemerintah Kota Manado, Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. (Hal i)
- Kieso, Weygandt, Warfield, 2008. *Intermediate Accounting*. Edisi ke-12, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Manus Lanny, 2009. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Pada Instansi Kota Manado, Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. (Hal i,10,15).
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mashun. Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, 1997. *Akuntansi Manajemen*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Simamora H, 2012. *Akuntansi Manajemen*. Edisi III, Star Gate Publisher, Yogyakarta.
- Taswan, 2013. *Akuntansi Perbankan (Transaksi dalam Valuta Rupiah)* Edisi III, Penerbit November, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.